



Evaluasi Program Bantuan Pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

Nailul Hidayat¹, Dina²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: kalandramuhammad848@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The Food Social Assistance Program in the form of 10 kg rice is one of the government policies aimed at supporting food security for economically vulnerable communities, particularly Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM). This study aims to evaluate the implementation of the 10 kg rice Food Social Assistance Program for KPM in Citali Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, in order to examine the extent to which the program has been implemented in accordance with its objectives and to identify challenges encountered during its implementation. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, beneficiary and non-beneficiary community members, direct field observations, and documentation review. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The program evaluation was analyzed using the CIPP model, which consists of context, input, process, and product aspects. The findings indicate that, in terms of context, the food assistance program is relevant to the socio-economic needs of the community in Citali Village. In the input aspect, issues related to the accuracy of beneficiary data and the inconsistent quality of rice assistance were identified. Regarding the process aspect, the distribution mechanism has generally been conducted in an orderly and timely manner; however, challenges remain in coordination and data management. Meanwhile, from the product aspect, the 10 kg rice assistance has helped reduce the economic burden of beneficiary families, although its benefits have not been evenly distributed among all eligible households. This study concludes that the Food Social Assistance Program in Citali Village has provided tangible benefits to the community but still requires improvements, particularly in updating beneficiary data, ensuring the quality of assistance, and strengthening coordination among relevant stakeholders to enhance program effectiveness and targeting accuracy.

Keywords: Program evaluation, food social assistance, 10 kg rice, beneficiary families, CIPP model.

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan beras 10 kg bagi KPM di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, guna mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, aparat desa, serta masyarakat penerima dan nonpenerima bantuan, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi program dianalisis menggunakan model CIPP yang meliputi aspek konteks, input, proses, dan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konteks, program bantuan pangan relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Citali. Pada aspek input, masih ditemukan permasalahan terkait akurasi data KPM dan kualitas bantuan yang tidak selalu konsisten. Dari aspek proses, mekanisme penyaluran bantuan pada umumnya telah berjalan tertib dan tepat waktu, namun masih menghadapi kendala dalam koordinasi dan pendataan. Sementara itu, dari aspek produk, bantuan beras 10 kg dirasakan membantu meringankan beban ekonomi KPM, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali telah memberikan manfaat nyata, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan penguatan koordinasi antar pihak agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Evaluasi program, bantuan sosial pangan, beras 10 kg, KPM, model CIPP.*

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial pangan berupa beras merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menanggulangi kerentanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Di Kabupaten Sumedang, program bantuan beras 10 kg telah disalurkan kepada 161.951 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan publikasi resmi pemerintah daerah tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa cakupan program cukup luas dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketahanan pangan masyarakat miskin. Namun demikian, laporan daerah juga menunjukkan bahwa penyaluran bantuan ini masih menghadapi kendala teknis dan administratif di beberapa wilayah.

Pada tingkat desa, tantangan pelaksanaan bantuan sosial seringkali lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta kapasitas aparat desa. Hal ini terlihat dalam penelitian Mardhotillah (2024) mengenai efektivitas BLT Dana Desa di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut menemukan adanya kendala dalam pendataan penerima, proses sosialisasi, serta ketepatan waktu penyaluran bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa desa yang sama dengan lokasi penelitian ini masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan program bantuan sosial.

Meskipun program bantuan sosial dirancang secara nasional dengan tujuan untuk disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, implementasinya di tingkat desa tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Ruhyana dan Hadi (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumedang sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga serta ketidakakuratan basis data penerima

manfaat. Permasalahan tersebut menyebabkan efektivitas program bantuan sosial menjadi kurang optimal.

Selain itu, aspek komunikasi juga memengaruhi keberhasilan bantuan sosial. Dalam sebuah studi tentang strategi komunikasi Program Pendampingan Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Praratya (2023) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi dengan masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kurangnya pemahaman selama proses distribusi.

Dalam situasi lain, keberhasilan program pangan bantuan juga harus dipertimbangkan dalam konteks pangan ketahanan lokal. Rahman (2015) menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan di Kabupaten Sumedang memiliki strategi hidup dan sistem pangan yang dipengaruhi oleh kondisi lokal serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program pangan harus memperbaiki kondisi lokal agar dapat memperkuat pangan rumah tangga.

Berdasarkan konsep yang telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan antara tujuan program bantuan pangan sosial dan implementasinya di lapangan, yang terutama membahas masalah pendataan, distribusi bantuan, kualitas informasi, dan koordinasi pihak. Hal ini dapat menjadi dasar bagi permasalahan penelitian: (1) Bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pangan bagi KPM di Desa Citali? (2) Apa hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan pembagian bantuan sosial pangan di Desa Citali? (3) Apa upaya strategi yang di terapkan dalam menghadapi hambatan tersebut?

Hasilnya, studi ini tidak hanya bermanfaat bagi para peneliti sebagai proses akademis, tetapi juga penting bagi pemerintah daerah dan negara bagian serta pekerja sosial dalam meningkatkan pelaksanaan program pangan. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menguji efektivitas program bansos beras di Desa Citali menggunakan model CIPP, yang belum pernah dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi deskriptif untuk menilai implementasi Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dan manfaat yang diterima oleh komunitas penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sampling purposif, yang meliputi kepala desa, pendamping sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, analisis data, dan analisis kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Citali, salah satu wilayah di mana program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg dilaksanakan untuk KPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Citali merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dengan luas total sekitar 151,55 hektar. Secara administratif, Desa Sukawangi terletak di sebelah utara, Desa Pamulihan terletak di sebelah timur, Desa Ciptasari terletak di sebelah selatan, dan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari terletak di sebelah barat. Secara geografis, wilayah Desa Citali terletak pada ketinggian sekitar 700 hingga 900 meter di atas permukaan laut, dan kondisinya didominasi oleh lahan pertanian dan perbukitan.

Berdasarkan data penduduk tahun 2024, terdapat sekitar 5.038 orang yang tinggal di Desa Citali, terdiri dari 2.544 anak-anak dan 2.494 perempuan, dengan 1.744 anggota keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 435 keluarga miskin, atau sekitar 25,45% dari total kepala keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih menghadapi tantangan sosial.

Secara administratif, Desa Citali dibagi menjadi 3 dusun, 10 RW, dan 28 RT. Sebagian besar tenaga kerja terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, karyawan swasta, dan pemilik usaha kecil. Kondisi ekonomi penduduk yang berada di sektor di bawah program bantuan sosial, khususnya dalam bentuk bantuan beras, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Gambaran Umum Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali

Program Bantuan Sosial Pangan, yang beratnya sepuluh kilogram, adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini dilaksanakan secara nasional hingga tingkat desa, termasuk di Desa Citali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah setempat, program bantuan pangan di Desa Citali dimulai pada tahun 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima sekitar 10 kg bantuan selama setiap siklus penyaluran. Pada beberapa periode, bantuan juga mencakup komoditas lain, seperti minyak goreng, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan program ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Dinas Sosial, PT Pos, dan pemerintah daerah. Pemerintah desa mampu mendukung proses penyaluran dengan menyediakan lokasi distribusi, membantu administrasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat penerima bantuan. Secara umum, tujuan program bantuan sosial pangan di Desa Citali adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Desa Citali. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat. Dari unsur pemerintah desa meliputi Kepala Desa, aparatur desa, dan Sekretaris Desa yang terlibat dalam pelaksanaan dan administrasi program bantuan sosial pangan.

Sementara itu, dari unsur masyarakat terdiri dari penerima bantuan (KPM) dan masyarakat yang tidak menerima bantuan (non-KPM).

Keberagaman informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program bantuan sosial pangan, baik dari sudut pandang pemerintah desa sebagai pelaksana program maupun masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak program. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, seluruh informan dalam penelitian ini diberikan kode tertentu.

Tabel 1 Profil Informan

No	Kode Informan	Usia	Jenis kelamin	Status Informan	Jabatan / Peran	Keterangan
1.	Informan 1, (I1)	47	Laki-laki	Pemerintah Desa	Kepala Desa Citali	Mengetahui kebijakan dan pelaksanaan umum program bantuan sosial pangan di tingkat desa
2.	Informan 2, (I2)	36	Laki -laki	Pemerintah Desa	Tata Usaha (TU)	Terlibat langsung dalam proses teknis penyaluran bantuan pangan
3.	Informan 3, (I3)	32	Perempuan	Pemerintah Desa	Sekretaris Desa	Membantu koordinasi dan administrasi pelaksanaan bantuan sosial pangan
4.	Informan 4 (I4)	64	Laki -laki	Masyarakat	Non - KPM	Masyarakat yang tidak menerima bantuan pangan dan merasakan dampak sosial program

5.	Informan 5 (I5)	36	Perempuan	Masyarakat	Penerima KPM	Penerima bantuan pangan beras 10 kg
----	-----------------	----	-----------	------------	--------------	-------------------------------------

Hasil Penelitian dari Aspek Context

Latar belakang studi ini menggambarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan, yang bernilai 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan sebagai inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Citali, jelas bahwa program pangan yang dimaksud merupakan program pemerintah yang dilaksanakan melalui desa. Menurut Kepala Desa, bantuan semacam ini ditujukan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu dan memerlukan bantuan pangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Di Desa Citali memang ada bantuan pangan berupa beras, itu program dari pemerintah pusat yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan melalui desa” (Wawancara Kepala Desa Citali).

Aparatur desa juga menyampaikan bahwa bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan oleh salah satu aparatur desa sebagai berikut:

“Bantuan ini memang sangat membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena tidak semua warga penghasilannya mencukupi.” (Wawancara Aparatur Desa Citali).

Hasil wawancara dengan KPM menunjukkan bahwa bantuan beras 10 kg dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan:

“Alhamdulillah sangat membantu, berasnya dipakai untuk makan sehari-hari di rumah.” (Wawancara KPM Desa Citali).

Namun demikian, ditemukan pula permasalahan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang belum menerima bantuan. Hal ini disampaikan oleh informan KPM sebagai berikut: “Ada yang sudah tepat, tapi ada juga yang kurang tepat, soalnya masih ada warga yang kondisinya kurang tapi tidak dapat bantuan.” (Wawancara KPM Desa Citali).

Secara keseluruhan, hasil analisis kontekstual menunjukkan bahwa program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masalah terkait ketepatan sasaran masih menjadi tantangan, sehingga pengumpulan data diperlukan agar program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Hasil Penelitian dari Aspek Input

Aspek input dalam penelitian ini berkaitan dengan kesiapan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Aspek ini meliputi data penerima bantuan, sumber daya manusia pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, serta ketentuan atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparatur desa, diketahui bahwa data KPM yang digunakan dalam penyaluran bantuan pangan berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana di tingkat lokal dengan mengacu pada data tersebut. Aparatur desa menyampaikan bahwa desa tidak sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan daftar penerima bantuan, melainkan hanya melakukan verifikasi dan penyesuaian di lapangan apabila terdapat perubahan kondisi masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa:

“Data penerima itu dari pusat, desa hanya menyesuaikan di lapangan. Kalau ada perubahan, kami laporkan, tapi tidak langsung bisa mengubah.” (Wawancara Sekretaris Desa Citali).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan pangan di Desa Citali terdiri dari perangkat desa dan petugas terkait yang membantu proses penyaluran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur desa memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan distribusi bantuan, mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat hingga pendampingan saat pembagian beras. Salah satu aparatur desa menyampaikan:

“Kami dari desa membantu mulai dari pemberitahuan ke warga sampai pembagian beras, supaya pelaksanaannya tertib.”

(Wawancara Aparatur Desa Citali)

Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang digunakan dalam penyaluran bantuan pangan relatif sederhana dan memanfaatkan sarana yang tersedia di desa, seperti kantor desa atau lokasi pembagian yang telah ditentukan. Beras yang diterima telah dikemas sesuai dengan ketentuan program, yaitu sebanyak 10 kg per KPM. Informan KPM menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan:

“Kalau jumlahnya sesuai, 10 kilo, tidak pernah kurang.

(Wawancara KPM Desa Citali)

Namun demikian, dari hasil wawancara ditemukan adanya permasalahan pada aspek input, khususnya terkait akurasi data penerima bantuan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa input berupa data penerima bantuan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Citali. Sebagaimana disampaikan oleh informan masyarakat:

“Masih ada warga yang ekonominya kurang tapi tidak masuk data penerima.” (Wawancara Masyarakat Desa Citali)

Selain itu, aparaturnya desa menyampaikan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan dilakukan berdasarkan ketentuan dan arahan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa menjalankan program sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek input menunjukkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai. Namun, permasalahan utama pada aspek ini terletak pada akurasi dan pemutakhiran data KPM yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Hasil Penelitian dari Aspek Process

Aspek process dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali dilaksanakan di lapangan, mulai dari mekanisme penyaluran, alur pembagian, hingga peran aparaturnya desa dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan aparaturnya desa, diketahui bahwa proses penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah desa dan petugas terkait. Pemerintah desa berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal pembagian bantuan serta membantu pelaksanaan distribusi agar berjalan tertib dan lancar. Kepala Desa menyampaikan bahwa pembagian bantuan biasanya dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat penerima:

“Kalau pembagian biasanya kami informasikan dulu ke warga, lalu pembagiannya diatur supaya tertib dan tidak menumpuk.” (Wawancara Kepala Desa Citali)

Hasil wawancara dengan aparaturnya desa menunjukkan bahwa proses pembagian bantuan pangan dilakukan dengan sistem antrean. Aparaturnya desa bertugas mengatur jalannya pembagian serta memastikan setiap KPM menerima bantuan sesuai ketentuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu aparaturnya desa:

“Pembagiannya pakai antrean, supaya tertib dan semua kebagian sesuai data.” (Wawancara Aparaturnya Desa Citali)

Dari sisi penerima bantuan, informan KPM menyampaikan bahwa proses penerimaan bantuan relatif mudah dan dapat dipahami. KPM datang ke lokasi pembagian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg. Salah satu informan KPM menyatakan:

“Biasanya datang ke tempat pembagian, antre, terus langsung dikasih beras.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Terkait ketepatan waktu, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan pangan umumnya disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informan KPM menyampaikan bahwa bantuan beras biasanya diterima tepat waktu

tanpa keterlambatan yang berarti. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau waktu pembagiannya biasanya tepat waktu.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Meskipun secara umum proses penyaluran berjalan dengan cukup baik, hasil penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam aspek proses. Kendala tersebut antara lain terkait dengan antrean yang cukup panjang pada saat pembagian serta masih adanya masyarakat yang mempertanyakan keadilan distribusi karena merasa layak menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai KPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses teknis penyaluran telah berjalan sesuai mekanisme, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan distribusi yang berdampak pada persepsi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek process menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah berjalan dengan mekanisme yang jelas dan relatif tertib. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pengaturan distribusi dan komunikasi kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi keluhan di lapangan.

Hasil Penelitian dari Aspek Product

Aspek product dalam penelitian ini menggambarkan hasil, manfaat, serta dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Fokus utama

aspek ini adalah sejauh mana program mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan, diketahui bahwa bantuan beras 10 kg memberikan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Informan KPM menyampaikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Alhamdulillah sangat membantu, berasnya dipakai buat makan sehari-hari di rumah.” (Wawancara KPM Desa Citali) Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan beras juga memberikan rasa aman bagi keluarga penerima dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Informan menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan pangan, mereka tidak terlalu khawatir terhadap ketersediaan beras di rumah, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan pangan memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga KPM.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang belum menerima bantuan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hasil program belum sepenuhnya adil dan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh informan KPM:

“Bantuannya memang membantu, tapi masih ada warga yang ekonominya kurang tapi belum dapat.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Terkait kualitas bantuan, informan KPM menyampaikan bahwa kualitas beras yang diterima bervariasi. Terdapat bantuan beras dengan kualitas yang baik, namun pada beberapa kesempatan kualitas beras dinilai kurang baik.

Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Kadang kualitasnya bagus, tapi kadang ada juga yang kurang bagus.” (Wawancara KPM Desa Citali)

Secara keseluruhan, hasil penelitian pada aspek product menunjukkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah memberikan manfaat nyata bagi KPM, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Namun, program ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, serta konsistensi kualitas bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan program sebagian telah tercapai, masih diperlukan perbaikan agar hasil dan dampak program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat Desa Citali.

Hambatan Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan serta hasil observasi langsung di lapangan, penelitian ini menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan dalam Pendataan KPM

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah terkait dengan pendataan Keluarga Penerima Manfaat. Data KPM yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan belum sepenuhnya diperbarui secara berkala. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula penerima bantuan yang dinilai oleh masyarakat sudah berada dalam kondisi ekonomi yang relatif lebih baik. Hal ini menimbulkan persepsi ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan.

2. Hambatan Administratif dan Koordinasi

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek administratif dan koordinasi antar aparat desa. Proses administrasi dalam pendataan dan verifikasi penerima bantuan masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam menyesuaikan data pusat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Selain itu, koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, sehingga memengaruhi kelancaran proses pelaksanaan bantuan.

3. Hambatan Teknis dalam Proses Penyaluran

Dalam pelaksanaan pembagian bantuan pangan, ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan. Proses pembagian bantuan dilakukan dengan sistem antrean yang terkadang memerlukan waktu cukup lama bagi penerima bantuan. Keterbatasan waktu dan sarana pembagian juga menjadi kendala yang dirasakan

oleh sebagian masyarakat penerima, meskipun secara umum penyaluran bantuan tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

4. Hambatan Kualitas Bantuan

Berdasarkan keterangan dari informan penerima bantuan, kualitas beras yang diterima tidak selalu konsisten pada setiap periode penyaluran. Sebagian penerima menyatakan bahwa kualitas beras yang diterima terkadang baik, namun pada kesempatan lain terdapat beras dengan kualitas yang kurang layak. Perbedaan kualitas ini menjadi salah satu hambatan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

5. Hambatan Sosialisasi dan Pemahaman Program

Hambatan lain yang ditemukan adalah terkait dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial pangan. Tidak seluruh masyarakat memahami secara jelas kriteria penerima bantuan dan mekanisme pelaksanaan program. Kurangnya pemahaman ini menimbulkan pertanyaan dan persepsi di kalangan masyarakat mengenai keadilan dan ketepatan sasaran program bantuan pangan.

Kesesuaian Program Bantuan Pangan dengan Kebutuhan Masyarakat (Context)

Aspek context dalam model evaluasi CIPP menilai kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg di Desa Citali dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan beras sangat membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga secara umum tujuan program dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa masyarakat kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan sasaran belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, program bantuan pangan di Desa Citali pada dasarnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi pemutakhiran data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar program dapat lebih tepat sasaran.

Kesiapan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan (Input)

Aspek input dalam model CIPP berkaitan dengan kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program, seperti data penerima, sumber daya manusia, serta sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data KPM yang digunakan dalam pelaksanaan program berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa hanya berperan dalam membantu proses verifikasi dan pelaksanaan di tingkat lokal. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam menentukan penerima bantuan secara langsung.

Dari sisi sumber daya manusia, aparatur desa dinilai telah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyaluran bantuan. Selain itu, sarana prasarana yang digunakan dalam proses distribusi bantuan juga dinilai cukup memadai. Namun demikian, kualitas data penerima bantuan masih menjadi

tantangan utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek data sebagai bagian dari input program menjadi penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan (Process)

Aspek process dalam evaluasi CIPP menilai bagaimana program dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran bantuan pangan di Desa Citali dilakukan melalui mekanisme yang relatif sederhana dan terjadwal. Pemerintah desa berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membantu pengaturan proses distribusi bantuan.

Pembagian bantuan dilakukan secara langsung kepada KPM dengan sistem antrean di lokasi yang telah ditentukan. Secara umum proses penyaluran berjalan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses distribusi berjalan lancar, komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap program masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pelaksanaan program secara teknis sudah berjalan baik, tetapi penguatan komunikasi dengan masyarakat tetap diperlukan.

Manfaat dan Dampak Program Bantuan Pangan bagi KPM (Product)

Aspek product dalam model evaluasi CIPP menilai hasil dan manfaat dari pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali memberikan manfaat langsung bagi KPM dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Bantuan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok.

Meskipun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan karena masih terdapat warga kurang mampu yang belum menerima bantuan. Selain itu, kualitas beras yang diterima penerima bantuan juga dinilai belum sepenuhnya konsisten.

Secara keseluruhan, program bantuan pangan telah memberikan manfaat nyata bagi KPM, namun masih diperlukan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan optimal.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagi pemerintah desa, diperlukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan terpadu serta menjaga konsistensi kualitas bantuan pangan. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan kondisi sosial ekonominya agar proses pendataan dapat berjalan lebih transparan dan adil.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Desa Citali sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain. Kedua, jumlah informan penelitian masih terbatas sehingga kemungkinan terdapat perspektif lain yang belum sepenuhnya terungkap. Selain itu, pengumpulan data yang didominasi oleh wawancara dan observasi sangat bergantung pada keterbukaan informan serta kemampuan peneliti dalam menggali informasi. Keterbatasan waktu penelitian juga mempengaruhi kedalaman pengumpulan data di lapangan.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali pada dasarnya telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Program ini dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas data KPM, serta pemerataan manfaat program. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial pangan di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Program Bantuan Sosial Pangan berupa beras 10 kg bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Dari aspek konteks, program bantuan pangan beras 10 kg dinilai relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Citali yang sebagian masih berada pada kondisi rentan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan sehingga ketepatan sasaran program belum sepenuhnya optimal. Dari aspek input, pelaksanaan program telah didukung oleh aparatur desa serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Akan tetapi, data KPM yang bersumber dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat secara aktual sehingga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Dari aspek proses, mekanisme penyaluran bantuan di Desa Citali telah berjalan relatif tertib sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, komunikasi dan sosialisasi program masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pelaksanaan program dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Dari aspek hasil atau produk, program bantuan pangan beras 10 kg telah membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM. Namun, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata dan kualitas bantuan yang diterima juga belum sepenuhnya konsisten.

Selain itu, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan seperti pendataan KPM yang belum diperbarui secara berkala, kendala administratif dan koordinasi aparatur desa, serta hambatan teknis dalam

penyaluran bantuan. Perbedaan kualitas beras yang diterima oleh KPM serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Namun demikian, pemerintah Desa Citali telah melakukan berbagai upaya seperti pemutakhiran data KPM, peningkatan koordinasi aparatur desa, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, Program Bantuan Sosial Pangan Beras 10 kg di Desa Citali telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan perbaikan terutama dalam hal ketepatan sasaran, pemutakhiran data penerima bantuan, serta pemerataan manfaat program agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hafidz, dkk. (2024). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sebelas April.
- Alkin, M. C., & Christie, C. A. (2004). An evaluation theory tree. In M. C. Alkin (Ed.), *Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences* (pp. 12-65). Sage Publications.
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Gie, T. L. (2009). *Administrasi perkantoran modern*. Liberty.
- Hakim, L., & Rahayu, S. (2019). Evaluasi berkelanjutan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 78-92.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9*. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 901*. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54*. Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan

- Nontunai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347. Kementerian Sosial.
- Kharisma, dkk. (2025). Pengaruh program BPNT terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 1-15.
- Kiswanto. (2021). Kepuasan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT): Studi di wilayah pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101-118.
- Mabruk, & Prasajo. (2023). Hambatan program BPNT dalam distribusi bantuan pangan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(1), 1-15.
- Mardhotillah, dkk. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45-67.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nauval, & Suparti. (2023). Pelaksanaan BPNT di Desa Halong: Tantangan koordinasi dan sumber daya lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 88- 104.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2005). *Teori budaya organisasi*. Rineka Cipta.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- Pertiwi, Qonita, & Sutrisno. (2024). Akurasi pendataan penerima bantuan beras untuk masyarakat miskin. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Kemiskinan*, 9(1), 22-38.
- Praratya. (2023). Strategi komunikasi pendamping PKH di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 11(1), 56-73.
- Putro, E. (2012). *Evaluasi program pembelajaran*. Pustaka Pelajar.
- Rahman. (2015). Kearifan lokal petani dan ketahanan pangan di Sumedang. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 6(3), 201-218.
- Ramdan, & Suryadi. (2020). Evaluasi program bantuan sosial: Pendekatan sistematis. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 121-135.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156. Sekretariat Negara.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Sage Publications.
- Ruhyana, & Hadi. (2020). Kebijakan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sumedang: Koordinasi lintas lembaga. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 14(3), 178-195.

- Sari, & Nurhadi. (2021). Hambatan implementasi program bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Kebijakan*, 8(1), 55-70.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Sage Publications.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31-62). Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2012). *Kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Suwanda, & Rahmawati. (2022). Efektivitas model CIPP dalam evaluasi program pemberdayaan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 104-118.
- Tayibnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi program*. Rineka Cipta.
- Umar, H. (2002). *Evaluasi kinerja perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Waldo, D. (1984). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration* (2nd ed.). Holmes & Meier Publishers.
- Wiyono. (2020). Model CIPP dalam evaluasi program pendidikan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(1), 45-62.
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product evaluation model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4), 57-84.